

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Kemudian pemerintah daerah juga diarahkan untuk melaksanakan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, diperlukan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara efektif. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada publik (masyarakat). Kegiatan pelayanan publik semata-mata didirikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari pembuatan identitas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, secara tidak langsung organisasi pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat sudah selayaknya memberikan informasi serta memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya, sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Perkembangan teknologi dan komunikasi pada masa sekarang telah mengubah sebagian pola aktivitas masyarakat dalam memenuhi

kebutuhannya. Seperti halnya dengan pelayanan publik, hal ini berarti bahwa setiap individu di belahan dunia dapat saling berkomunikasi serta mendapatkan informasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun. Kegiatan komunikasi ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat luas.

Pengembangan pelayanan publik berbasis pada teknologi informasi dan elektronik sudah banyak dikembangkan di beberapa kota besar di Indonesia. Seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Makassar dan lain-lain. Beberapa kota tersebut rupanya sudah lebih awal mewujudkan pengembangan teknologi. Dimana pelayanan publik saat ini sudah harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah daerah perlu merubah sistem pelayanan publik menjadi berbasis teknologi informasi atau yang disebut juga *smart city*. Perubahan sistem ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami konsep dari sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi ini. Di Indonesia sendiri, masyarakat sudah mengetahui istilah *smart city* ini tetapi masyarakat belum memahami secara penuh tentang apa saja yang dibahas dari *smart city* ini.

Smart city memang sedang menjadi *trend* di Indonesia. Bukan hanya sebagai bentuk gengsi untuk disebut sebagai kota cerdas, namun *smart city* adalah sebuah langkah yang hebat dalam memajukan kota dalam suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara harfiah, *smart city* memang diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif.

Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah paparan mendefinisikan *Smart City* sebagai konsep penataan kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang

luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan antara lain, menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju dan modern, meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi dan membangun fondasi indonesia *smart nation*.

Di Indonesia sendiri sudah ada model yang diciptakan untuk penerapan kota cerdas atau *smart city* yaitu *Garuda Smart City Model*. Kota-kota besar di Indonesia sudah mulai menerapkan konsep tersebut, namun masih belum mencapai seutuhnya. Salah satu dimensi terpenting dari *smart city* adalah bahwa kota saat ini seharusnya memberikan pelayanan yang menggunakan teknologi terkini dan membangun infrastruktur yang pintar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan murah kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota. *Smart city* merupakan kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia (SDM), modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

Menurut Stephen Ezell / *Vice President Global Innovation Policy Information Technology and Innovation Foundation* (2015), salah satu keuntungan konsep Kota Pintar (*Smart City*) adalah dapat menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan, konsep Kota Pintar (*Smart City*) juga membuat *layanan e-government* dapat lebih cepat implikasinya kepada masyarakat, konsep Kota Pintar (*Smart City*) juga dapat membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakatnya, menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energi, lingkungan juga bisa menjadi lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju, Kota Pintar (*Smart City*) juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Kota menjadi entitas yang menarik perhatian banyak peneliti. Tidak hanya karena kota memiliki dinamika perubahan yang begitu cepat, tetapi juga karena dalam banyak prediksi yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian bahwa hampir 50% penduduk dunia akan memzadati kota (*Senate Department for Urban Development and the Environment*, 2015; Bakıcı, et.al., 2013; Chourabi, et.al., 2012). Akibatnya kota semakin menghadapi tantangan yang luar biasa besar dan kompleks terkait dengan fasilitas yang diberikan kepada warganya. Kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, sehingga warga kota merasakan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan tinggal di kotanya harus dipenuhi oleh pengelola kota (Neirottia, et.all., 2014; Nam and Pardo, 2011; Washburn and Sindhu, 2010).

Konsep kota pintar diyakini bisa menjadi solusi atas persoalan Pembangunan kota di daerah. Kota Pintar di desain untuk mampu meningkatkan produktivitas manusia yang tinggal di dalamnya, sehingga akibat penataan dan pengelolaan kota yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan digital secara optimal di semua aspek. Mulai dari sistem pengelolaan gedung, pengelolaan kualitas lingkungan, serta pelayanan publik. Singkatnya, kota dikembangkan menjadi mesin ekonomi dan produktivitas yang pada akhirnya menjadikan masyarakatnya sehat, produktif dan sejahtera. Program-program pemerintah yang sukses memiliki berbagai macam strategi dan cara untuk mendapatkan pengakuan serta kepercayaan dari masyarakat bahwa Kota memang mempunyai keunggulan dari daerah-daerah yang ada. Untuk menciptakan Kota sebagai *Smart City* pemerintah terus berupaya merealisasikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebagai salah satu kota kecil di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, Kota Pariaman menjadikan konsep *smart city* sebagai sebuah *city branding*, yaitu *Pariaman Smart City*. Untuk mewujudkan konsep *smart city* di Kota Pariaman, Pemerintah Kota

Pariaman telah melakukan proses digitalisasi dan komputasi dalam beberapa bidang terutama pemerintahan dengan harapan akan menciptakan suatu pemerintahan yang lebih terbuka, mendorong partisipasi serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kota. Sebelum mempromosikan konsep *Pariaman Smart city* sebagai sebuah *city branding* di Kota Pariaman, Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan beberapa usaha dalam rangka memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang konsep *smart city*.

Di sisi lain, masih banyak masyarakat Kota Pariaman yang belum memahami makna *smart city* tersebut. *Smart city* dipahami oleh sebagian besar masyarakat adalah internet dan aplikasi. Faktanya, kedua hal tersebut hanyalah faktor penunjang dalam mewujudkan konsep *smart city*. Jika masyarakat itu sendiri belum memahami makna *smart city*, tentu saja mereka tidak akan mendapatkan manfaat lebih dari program pemerintah ini. Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman juga akan kesulitan dalam mewujudkan *branding Pariaman Smart city* ini. Bagaimanapun juga, untuk mewujudkan sebuah *city branding* memerlukan dukungan dari seluruh *stakeholder* terutama masyarakat daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemahaman dan harapan masyarakat kota Pariaman terhadap implementasi *smart city* dengan judul :

“Analisis Pemahaman dan Harapan Masyarakat terhadap Implementasi *Smart City* di Kota Pariaman”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Apakah masyarakat kota Pariaman telah memiliki pemahaman yang cukup

terhadap istilah *smart city* ?

2. Bagaimana harapan masyarakat kota Pariaman terhadap kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan *smart city* ?
3. Bagaimana pendapat masyarakat kota Pariaman terhadap tingkatan prioritas komponen *smart city* yang akan diterapkan oleh Pemko ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat kota Pariaman terhadap istilah *smart city*.
2. Untuk mengetahui harapan masyarakat kota Pariaman terhadap kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan *smart city*.
3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat kota Pariaman terhadap tingkatan prioritas komponen *smart city* yang akan diterapkan oleh Pemko.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi-referensi bagi penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait *smart city*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan permasalahan yang berkaitan tentang

kebijakan pemerintah terkait *smart city*.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan atau dasar pengambilan keputusan dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan implementasi *smart city* khususnya di bidang ekonomi di kota Pariaman.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai penambah wawasan masyarakat terhadap konsep *smart city*. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengetahui prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dalam penetapan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan implementasi *smart city*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah mengenai penelitian yang dilakukan serta rumusan, tujuan, manfaat dan sistematika penulisannya.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori tentang penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai lokasi dan waktu penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian Analisis Pemahaman dan Harapan Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah dalam

Mengimplementasikan *Smart City* di Kota Pariaman.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan,saran dan keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan.



